

STUDI FENOMENOLOGI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG

Rachmawati**Ali Djamhuri****Wuryan Andayani**

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

rafilala18@gmail.com

Abstract

This research is aimed to obtain deep understanding about the meaning of accrual based accounting implementation based on financial management experience in Saiful Anwar hospital. Through Husserl's phenomenology, the implementation of accrual-based accounting is interpreted as "making us uncertain" and "complicated" which ultimately leads to the awareness that the presence of accrual-based accounting is interpreted as one of the "needs" to control all operational activity in Saiful Anwar hospital. In the facts, the application of accrual-based accounting in RSSA has not been fully applicable, especially in financial filing report based on SAK. It is because the obstacle coming from the internal itself. One of the obstacles faced in implementing these standards is the accounting system that has not been integrated with all units in RSSA so as to affect the accuracy and speed of time in the preparation of the financial statements of RSSA due to the preparation of financial statements are still manually implemented.

Keywords:

Accounting, Accrual Based Accounting, Husserl's Phenomenology, financial report, accounting system

Rumah Sakit sebagai salah satu organisasi yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Achsin, 1997). Menurut Ikhsan & Dharmanegara (2011), Rumah Sakit merupakan suatu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan dan organisasi yang unik, yang kompleks, padat karya, memiliki sifat, fungsi, dan ciri-ciri yang khusus yang sedikit berbeda dengan organisasi sektor publik lainnya. Fungsi lain dari Rumah Sakit selain memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, Rumah Sakit juga berfungsi sebagai tempat pelatihan, pendidikan dan penelitian.

Secara makro tantangan utama yang dihadapi oleh Rumah Sakit adalah bagaimana Rumah Sakit mampu memenuhi kebutuhan kesehatan yang meningkat sedangkan SDM, pendanaan, sarana dan prasarana, ilmu dan teknologi, manajemen, serta material kesehatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit sangat terbatas (Adisasmito, 2010). Permasalahan utama yang dihadapi Rumah Sakit secara berangsur-angsur terutama disebabkan oleh tuntutan masyarakat yang tinggi dalam peningkatan mutu pelayanan yang diberikan. Perubahan orientasi pelayanan yang tidak lagi memihak pada para pengelola Rumah Sakit melainkan berpihak pada "Kepuasan Pelanggan" yang harus dijadikan fokus utama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Buruknya gambaran tentang sektor publik tersebut, tidak hanya terjadi pada Rumah Sakit Pemerintah saja, akan tetapi terjadi pada hampir semua organisasi sektor publik di Indonesia, sehingga perlunya pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan, dan akuntabel (Ikhsan & Dharmanegara, 2010). Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi pengelola sektor publik termasuk Rumah Sakit dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat atas pengelolaan keuangannya (Asfiansyah, 2015), oleh karena itu perlunya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan di semua sektor publik.

Salah satu bentuk paradigma baru pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia adalah dengan diperkenalkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) (Armen & Azwar, 2013). PPK-BLU merupakan bentuk pola pengelolaan keuangan yang memberikan keleluasaan (fleksibilitas) bagi instansi yang telah menerapkannya. Beberapa peraturan yang secara khusus mengaturnya yaitu: UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, dan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Perubahan tersebut membawa perubahan pada penatausahaan pada instansi yang telah menerapkannya, salah satunya adalah Rumah Sakit yang telah menerapkannya. Perubahan penatausahaan tersebut salah satunya adalah penerapan akuntansi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang digunakan yakni dengan disusunnya laporan keuangan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan akuntansi tersebut, termasuk penerapan akuntansi berbasis akrual tidak hanya sebatas pengambilan keputusan saja, namun manfaat utama yang didapat dari penerapan akuntansi berbasis akrual menurut Diamond (2002) dalam Ichsan (2013), adalah: (1) meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya, (2) penguatan akuntabilitas, (3) meningkatkan transparansi atas total biaya dari aktivitas pemerintahan, (4) pengaruh dari aktivitas pemerintah terhadap ekonomi dapat dilihat secara luas dan lengkap.

Pengimplementasian akuntansi berbasis akrual pada Instansi Pemerintah di Indonesia, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sampai pada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari penerapan akuntansi berbasis kas, kemudian diperkenalkannya penerapan akuntansi berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*) sebagai bentuk upaya dari Pemerintah untuk mempermudah penerapan akuntansi berbasis akrual yang pelaksanaannya secara serempak pada tahun 2015. Penerapan Akuntansi berbasis CTA tersebut merupakan model modifikasi dari akuntansi basis kas dan basis akrual (pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas (Yabbar & Hamzah, 2015).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian akuntansi berbasis akrual tersebut adalah minimnya pemahaman para pengelola keuangan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo yang dikutip dari media online berita jatim menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian akuntansi berbasis akrual adalah staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan daerah. Lebih lanjut, Bapak Soekarwo menjelaskan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan bukanlah orang akuntansi, akan tetapi orang yang memiliki ilmu di bidang sosial politik yang dididik dan dilatih untuk menjadi *accounting* atau seorang akuntan.

Motivasi penelitian ini didasarkan pada pelaksanaan PP No 71 tahun 2010 yang mengamanatkan pada semua Instansi Pemerintah, termasuk Rumah Sakit untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Permasalahan yang dihadapi disaat pengimplementasian akuntansi berbasis akrual adalah latar belakang pendidikan para pengelola keuangan di kalangan SKPD sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, memberikan gambaran bahwa sebagian besar para pengelola keuangan tersebut berlatar belakang pendidikan bukan seorang akuntan melainkan sarjana sosial yang dididik dan dilatih sebagai tenaga akuntan. Hal tersebut yang menggelitik hati peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang pemahaman para pengelola keuangan memaknai pengimplementasian akuntansi berbasis akrual tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya para pengelola keuangan yang ada di SKPD merasa “siap atau ‘tidak siap”, “sanggup atau sanggup”, “mampu atau tidak mampu” tetap harus menerapkannya. Sehingga muncul pertanyaan penelitian yang ingin diangkat oleh peneliti yakni “bagaimana para pengelola keuangan di RSSA memaknai pengimplementasian akuntansi berbasis akrual tersebut?”. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna pengimplementasian akuntansi berbasis akrual berdasarkan pengalaman para pengelola keuangan di RSSA.

METODE

Jenis dan Paradigma Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan natural setting dalam rangka memperoleh pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dengan maksud memahami apa yang terjadi serta bagaimana terjadinya (Indrianto & Supomo, 2009; Denzim & Lincoln, 2011; Miles & Hubberman, 1992). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif sendiri bertujuan untuk menganalisis realitas sosial apa adanya serta memahami bagaimana realitas sosial itu terbentuk dari sudut pandang pelaku yang terlibat langsung dengan proses sosial tersebut (Chariri, 2009; Ludigdo, 2013).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang nampak atau yang muncul dengan sendirinya (Kuswarno, 2009:04). Tujuan utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu terhadap fenomena yang terjadi menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari universal atas “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya (Creswell, 2015).

Ada dua pendekatan dalam penelitian fenomenologi yakni fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi transendental (Creswell, 2015). Fenomenologi hermeneutik lebih mengarah pada pengalaman hidup dan ditujukan untuk menafsirkan tentang “teks” kehidupan (Van Manen, 1990). Sebaliknya fenomenologi transendental berfokus pada deskripsi pengalaman dari partisipan (informan) (Moustakas, 1994). Transendental sendiri banyak mendapat kontribusi dari Husserl yang mencoba untuk meneliti dengan menggunakan analisis kesadaran dengan mengesampingkan realita sehingga unsur subyektifitas dari peneliti lebih menonjol (Sopanah, 2009) sedangkan transendental sendiri berarti segala sesuatunya dipahami secara segar (baru), seolah olah untuk pertama kalinya (Moustakas, 1994). Pada konteks penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi transendental.

Situs, Informan dan Teknik Pengumpulan Data

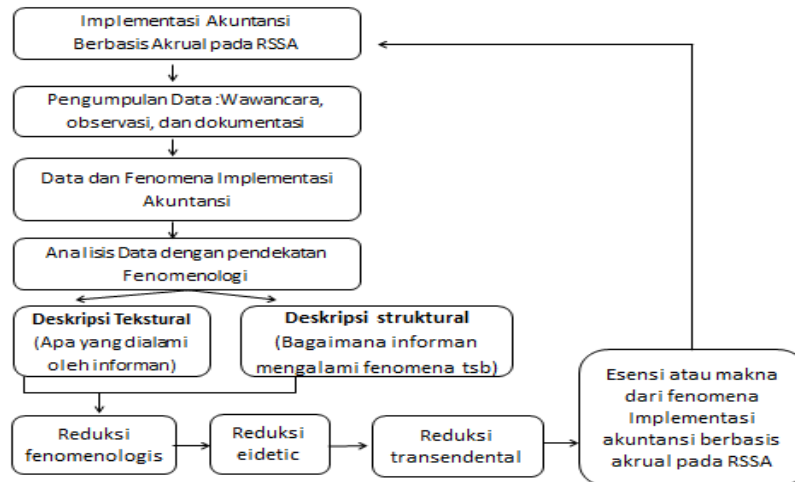
Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang (RSSA). RSSA merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ber tipe A Pendidikan dan telah berstatus sebagai Rumah Sakit BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Pemilihan RSSA sebagai situs penelitian dengan pertimbangan bahwa pengimplementasian akuntansi berbasis akrual di RSSA baru memulainya pada tahun 2015 sehingga memungkinkan bagi para pengelola keuangan berbeda dalam memaknainya.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 6 orang pengelola keuangan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan. Identitas informan yang terlibat dalam penelitian ini digunakan nama singkatan untuk menjaga privasi dan kenyamanan informan dalam memberikan informasi.

Pengumpulan data dilakukan selama 2 (dua) bulan mulai Mei sampai dengan Juli 2016 berdasarkan observasi nonpartisipan, wawancara mendalam dengan para informan dan dokumentasi. Observasi nonpartisipan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara tidak langsung atas aktivitas penyusunan laporan keuangan. adakalanya melakukan pengamatan dengan cara melebur dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan tanpa merasa terganggu atas kehadiran peneliti. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi di lapangan dalam suatu dokumen setelah mendapat persetujuan dari masing-masing informan.

Teknik Analisis Data

Menurut Kuswarno (2009) penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Husserl terdapat 3(tiga) langkah dalam menganalisis data yakni: (1) reduksi fenomenologis, (2) reduksi *eidetic*, (3) reduksi transendental. Adapun gambaran diagram teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti berikut ini:



Gambar 1: Teknis Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi nonpartisipan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan wawancara yang mendalam dengan informan berkaitan dengan implementasi akuntansi berbasis akrual pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dapat disimpulkan bahwa pemahaman awal mengenai hadirnya akuntansi akrual bagi para pengelola keuangan dianggap sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan PP 71 tahun 2010 yang kemudian pada akhirnya dalam pengimplementasiannya para pengelola keuangan tersebut menyadari bahwa dengan adanya akuntansi akrual memberikan manfaat lebih khususnya bagi internal Rumah Sakit yakni hadirnya akuntansi akrual sebagai kontrol kegiatan operasional Rumah Sakit, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan, serta mempermudah pemenuhan kebutuhan audit.

Terdapat fenomena menarik ketika peneliti melakukan wawancara yang mendalam kepada beberapa informan terpilih di awal wawancara mengenai pelaksanaan akuntansi akrual sebagai akibat dari penerapan PP 71 tahun 2010, berikut adalah beberapa petikan wawancara dengan informan. Fenomena hadirnya akuntansi akrual dianggap sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan PP 71 tahun 2010 yang mengharuskan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual sebagaimana dinyatakan oleh Pimpinan Rumah Sakit berikut ini:

“Akuntansi akrual itu diberlakukan pada saat PP 71 tahun 2010 diterbitkan, tapi Pemprov ngasih kebijaksanaan untuk pelaksanaannya baru **dilaksanakan awal tahun 2015** mbak..” (Ibu RK).

Kemudian diperjelas dengan pernyataan pejabat penatausahaan keuangan melalui pernyataannya berikut ini:

“.. sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2010 kita sebagai SKPD **wajib menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual** meskipun pemahaman para pengelolamkeuangan yang ada di sini masih belum semuanya memahami jadi mau gak mau harus dilaksanakan karena sudah ada PP nya” (Bapak MS).

Sementara itu Bendahara Rumah Sakit melalui pernyataannya berikut ini:

“...setahu saya awal-awal akrual muncul dan gencar-gencarnya pada saat menjelang akhir tahun 2014, kalo ndak salah ya... orang-orang Provinsi bilang kalau awal tahun 2015 harus sudah akrual karena PP nya sudah terbit **dan mau gak mau tahun itu (2015) harus dijalankan**” (Bapak DA).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh fungsi akuntansi RS yang secara terbersit menunjukkan adanya keraguan akan keberhasilan penerapan akuntansi akrual di Rumah Sakit sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“.. heemm.. secara pribadi saya mendukung apa yang menjadi ketetapan dari pemerintah provinsi mbak, namun dengan terbitnya PP 71 tahun 2010 tapi ini yang membikin agak ribet bahkan kita bisa keteteran dalam pengimplementasiannya, jadi **konsekuensinya kita harus wajib menyusunnya**” (Bapak HM).

Lebih lanjut pejabat penyusun laporan persediaan Rumah Sakit menegaskan melalui pernyataannya sebagai berikut:

“.. awal tahun 2015 pada saat kita dikasih pelatihan oleh provinsi tentang apa itu akrual tapi saya sendiri gak begitu paham tapi ginama lagi **mbak tetep harus dilaksanakan**” (Ibu EM).

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari pejabat penyusun aset Rumah Sakit melalui pernyataannya berikut ini:

“ awal-awal pelaksanaan akrual sempat kerepotan mbak, bingung apa itu akrual tapi mau gimana lagi ya **harus tetap dilaksanakan karena sudah ada PP nya e mbak...**”

Analisis mendalam terkait fenomena tersebut diatas berdasarkan pernyataan para informan peneliti membracketing pada diperoleh deskripsi tekstural [**dilaksanakan awal tahun**], [**wajib menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual**] menunjukkan bahwa terbitnya PP 71 tahun 2010 mewajibkan semua SKPD yang ada di organisasi pemerintahan untuk menerapkan akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Kemudian pernyataan tersebut juga menunjukkan deskripsi struktural yang diperoleh dari kutipan pernyataan [**konsekuensinya kita harus wajib menyusunnya**] yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk konsekuensi dari terbitnya PP 71 tahun 2010 yang dipertegas dari kutipan pernyataan [**tetep harus dilaksanakan**] dan [**harus tetap dilaksanakan karena sudah ada PP nya**].

Kemudian lebih lanjut peneliti melakukan wawancara mendalam mengenai makna akuntansi akrual kepada para informan dan diperoleh pemahaman yang beragam mengenai makna dari implementasi akuntansi akrual tersebut. Berikut pernyataan para informan mengenai makna akuntansi akrual berdasarkan pemahaman para informan berikut ini:

Pejabat penatausahaan keuangan Rumah Sakit memaknai akuntansi akrual sebagai kontrol dan pengendali keuangan yang memberi manfaat bagi manajemen dalam rangka perencanaan dan pencatatan lebih akurat, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“..sebenarnya akuntansi **akrual itu sebagai kontrol**, oleh karena itu dengan adanya sistem akrual kita bisa mengendalikan dari sisi keuangan baik itu clash flownya maupun penggunaan brg dr sisi persediaannya. Kapan harus beli, kapan harus disediakan, kapan harus didistribusikan, kapan kita harus menyediakan uang, kemudian sejauh mana aset kita bertambah itu akan tercermin di dalam perubahan ekuiti, namun demikian dari sisi cash flow itu sendiri atau arus kas kita bisa mengontrol asalnya dari mana saja kas itu kita dapatkan, kemudian digunakan untuk apa saja kas itu sendiri, dengan demikian **diharapkan manajemen bisa ke depannya**

bisa merencanakan lebih awal, lebih akurat dengan adanya data pencatatan yg lebih akurat lagi.” (Bapak MS)

Lebih lanjut Bendahara Rumah Sakit memaknai akuntansi akrual pada saat di awal penerapannya membuat “ruwet” dan pada akhirnya menimbulkan kesadaran tentang manfaat lebih dari penerapan akuntansi, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“**awal-awal adanya akrual bikin ruwet** gak karuan, pekerjaan lainnya keteter tapi setelah berlanjut ber bulan-bulan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pihak provinsi akhirnya jadi tau manfaatnya jika implementasinya terlaksana dengan baik, kayak **mempermudah pekerjaan** gitu mbak...” (Bapak DA).

Pejabat penyusun aset memaknai akuntansi akrual sebagai sistem yang mempermudah koreksi dalam proses penyusunan laporan persediaan sehingga mempermudah penyediaan data dalam rangka pemenuhan kebutuhan audit internal maupun eksternal bagi Rumah Sakit, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“.. akuntansi itu **membuat kerjaan kita jadi enak** mbak.., **karena akuntansi pencatatan kita jadi tertib sehingga bila adanya pengecekan atau pemeriksaan** kita tidak menjadi jadi tidak masalah untuk menampilkan data-data itu, padahal di awal sempat bikin pekerjaan yang lain terbengkalai **dan bikin gak pulang-pulang mbak**” (DR).

Senada dengan pernyataan pejabat penyusun persediaan menyatakan bahwa dengan adanya akuntansi akrual akan meminimalisir kesalahan dalam pencatatan sebagai bentuk pengawasan internal bagi Rumah Sakit, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“...**akan baik sekali jika akuntansi akrual ini diterapkan**, apalagi saat ini lagi giat-giatnya penerapan akuntansi akrual, boleh dibilang penerapan akrual tersebut salah satunya **sebagai pengawasan internal** bagi kita dalam menyusun laporan” (Ibu EM)

Analisis mendalam dari pernyataan tersebut diatas diperoleh deskripsi tekstural berupa [awal-awal adanya akrual bikin ruwet] dan [bikin gak pulang-pulang] yang kemudian memunculkan deskripsi struktural pada kutipan pernyataan pada [akrual itu sebagai kontrol], [pencatatan kita jadi tertib sehingga bila adanya pengecekan atau pemeriksaan] dan [pengawasan internal], menunjukkan bahwa adanya kesadaran akan pentingnya manfaat dari pengimplementasian akuntansi khususnya bagi internal Rumah Sakit yakni hadirnya akuntansi akrual sebagai kontrol kegiatan operasional Rumah Sakit, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan, serta mempermudah pemenuhan kebutuhan audit.

Kemudian peneliti melakukan wawancara yang mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan implementasian akuntansi berbasis akrual pada Rumah Sakit (RSSA) sebagaimana penjelasan dari fungsi akuntansi berikut ini: Terdapat 2 (dua) bentuk laporan keuangan yang menjadi kewajiban Rumah Sakit yakni laporan keuangan SAP (sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai SKPD) dan laporan keuangan SAK (sebagai bentuk pertanggung jawaban BLUD) dimana keduanya berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual tersebut diterapkan setelah diterbitkannya PP 71 tahun 2010 sehingga merubah penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit yang selama ini masih berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*). Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual tersebut masih baru berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun terdapat banyak kendala yang muncul dari internal Rumah Sakit yang selama ini menghambat pengimplementasian akuntansi akrual di Rumah Sakit. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis komputasi sedangkan SAK masih disusun secara manual. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak MS selaku Pejabat penatausahaan keuangan berikut ini:

“... selama ini SAP disusun dengan menggunakan aplikasi SIBAKU di bawah pengawasan BPKAD Provinsi Jawa Timur jadi sudah tersistem dengan baik, tapi berbeda dengan SAK yang masih manual atau penyusunannya masih berupa konversi dari SAP ke SAK”.

Senada dengan pernyataan Bapak MS yang disampaikan oleh Bapak DR sebagai berikut:

“... kalau SAP sih sudah enak mbak..**sudah tersistem dengan baik**, namanya SIBAKU (Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrua), cuman diawalnya aja dulu SIBAKU belum bisa digunakan secara sempurna, ya.. karena SIBAKU belum terkoneksi dengan sistem aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) tapi hal itu bisa diatasi dan sampai dengan sekarang sudah lancar dan tidak ada masalah lagi, tapi ya gitu dikitnya yang belum bisa menyeimbangi mbak.., karena sistem aplikasi persediaan medis kita itu menggunakan aplikasi lain jadinya gak connect dengan SIMBADA. Lagi-lagi hal itu juga bisa teratasi mbak..”.

Hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian akuntansi berbasis akrual pada RSSA sebenarnya berasal dari internal RSSA sendiri, sebagaimana pernyataan para informan di bawah ini:

“..**kendala adalah support dari teman-teman yang ada diluar akuntansi** namun sangat berpengaruh dalam laporan keuangan akuntansi, contohnya saja persediaan sampai sekarang kita belum mendapatkan data rincian persediaan medis berdasarkan BAPP selama ini mereka menginput data persediaan berdasarkan faktur sehingga menimbulkan selisih-selisih yang sampai sekarang belum ketemu dimana nya..”
(Bapak DR)

“..**persoalannya itu berasal dari internal RS sendiri** itu pada prosedur pengelolaan barang di RSSA yang panjang dan ruwet, jadi angka persediaan ditempatku sama diakuntansi pasti gak sama dan banyaknya jumlah persediaan dipunyaku..”(Ibu EM)

Potret implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan SAP dan SAK secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan berdasarkan kedua standar tersebut telah terkonsep dengan baik yang dan telah disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan sistem akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan kedua standar terdapat perbedaan yang bertolak belakang, dimana sistem akuntansi SAP telah tersistem dengan baik meskipun diawal mengalami hambatan, sedangkan sistem akuntansi dalam rangka penyusunan laporan SAK belum tersistem dengan baik dikarenakan sistem yang ada belum terbangun dengan sempurna. Hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian akuntansi khususnya penyusunan laporan SAK berasal dari internal RSSA sendiri. Permasalahn tersebut disebabkan oleh proses pengumpulan data yang berada di bawah kewenangan dan koordinasi lintas bidang dan sistem yang belum terintegrasi dengan semua unit kerja yang ada di Rumah Sakit. Hal tersebut berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta kecepatan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum makna akuntansi berbasis akrual dimaknai sebagai sebuah konsekuensi dari penerapan PP No. 71 tahun 2010 yang harus dilaksanakan meskipun dalam pelaksanaannya para pengelola keuangan belum sepenuhnya memahami tentang makna dari pengimplementasian akuntansi akrual. Pada akhirnya pengimplementasian akuntansi berbasis akrual tersebut membawa kesadaran bagi para pengelola keuangan tentang pentingnya manfaat dari penerapan akuntansi akrual.

Hadirnya akuntansi sebagai kontrol atas segala kegiatan operasional RS, pemenuhan kebutuhan audit, dan berperan sebagai pengawasan internal untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang akan dihasilkan. Meskipun dalam pengimplementasiannya berdasarkan pemahaman para informan “**bikin ruwet** dan “**bikin gak pulang-pulang**”. Hambatan yang muncul pada saat pengimplementasian akuntansi berbasis akrual di RSSA berasal dari internal RSSA sendiri yakni sistem yang belum terintegrasi dengan semua unit yang ada di Rumah Sakit sehingga seringkali terjadi ketidak akuratan data yang akan disampaikan dalam laporan keuangan.

Saran bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggali informasi pada semua pihak yang terlibat langsung dalam proses sehingga peneliti dapat memperoleh informan dengan berbagai pola pemikiran yang berbeda dalam memaknai sebuah pengimplementasian akuntansi berbasis akrual sehingga informasi yang diperoleh informasi lebih beragam, lebih lengkap, dan lebih mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Achsin, M. 1997. *Pedoman Penetapan Harga Pokok Standar Produk Jasa: RSUD Dr. Saiful Anwar Malang*. Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Adisasmito, Wiku. 2008. *Kesiapan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Globalisasi. Case Studi : Analisis Kesehatan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Armen, F., dan Azwar, V. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Penerbit : Gosyen Publishing Sleman, Yogyakarta.
- Chariri, A. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Paper disajikan pada Workshop Metodologi Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 31 Juli-1 Agustus 2009.
- Creswell, John.W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di antara Lima Pendekatan*. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Diamond, Jack. (2002). *Performance Budgeting : Is Accrual Accounting Required ?*. International Monetary Fund.
- Husserl, E. 1997. *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology (D.Carr, Trans.)*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Ichsan, Muhammad. 2013. *Manfaat Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan : Pondasi Manajemen Biaya Entitas Pemerintahan. Modul Gabungan Pemerintah Berbasis Akrual : Konsep, Pemikiran, dan Implementasi di Indonesia*. Penerbit : BPKP Jakarta..
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta:BPFE.
- Ikhsan, A., dan Dharmanegara, I.B. Agung. 2010. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Penerbit: Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi : Konsep, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Widya Padjajaran. Bandung.
- Moustakas, C. 1994. *Phenomenological Research Methodes*. Thousand Oaks, CA:Sage.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Sopannah. 2009. *Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD*. SNA 12 Palembang. www.konsultanstatistik.com..
- Van Manen, M. 1990. *Researching Lived experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*. Albany:State University of New York Press.
- Yabbar, R., dan Hamzah, A. 2015. *Konsep dan Aplikasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Penerbit: Pustaka. Surabaya.